

PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JATIROKE KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Rinny Dewi Anggraeni¹,
I Gusti Ayu Ambarawati², Yani Alfian³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
rinny.anggraeni68@gmail.com

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF TOURIST VILLAGE IN JATIROKE VILLAGE, JATINANGOR DISTRICT, SUMEDANG REGENCY, WEST JAVA PROVINCE

The results of the PkM regarding the development of a tourism village program in realizing Independent Village in Jatiroke Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province, are that the village tourism program by the village government has not been implemented well in accordance with the opinion of Hadiwijoyo (2005:72), regarding the principles of tourism development. This is proven by the lack of village government in providing support and promoting tourist villages in Jatiroke Village. Apart from that, the village government must always involve the community in planning and developing tourist villages, so that the existence of tourist villages in Jatiroke Village does not contribute to improving community welfare.

The tourism village program in Jatiroke Village as a potential for increasing development and the village economy is experiencing several obstacles. namely the development of a tourist village by the government of Jatiroke Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, among other things, due to a lack of budget and community support, this means that the potential of the tourist village cannot be developed. Such as the existence of government laboratories and village websites to support its existence, so that it is less attractive for tourists to come. Then the support for facilities in tourist villages is still inadequate.

The strategy carried out by the Head of Jatiroke Village in improving the tourism village program as a tourist attraction that has and provides income to improve the village economy and increase the PAD of Jatiroke Village, Jatinangor District, Sumedang Regency is still not focused, and does not involve management and community support for the development of tourist attractions, so it is not optimal.

Key words: *tourism village program, potential for village economic development*

ABSTRAK

Hasil PkM tentang pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bahwa program desa wisata oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan

mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain itu pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program desa wisata di Desa Jatiroke sebagai potensi meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa mengalami beberapa hambatan. yaitu pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang antara lain karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium pemerintahan dan website desa untuk menunjang keberadaannya, sehingga kurang menarik minat wisatawan untuk datang. Kemudian dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan PAD Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih belum terarah, dan belum melibatkan pengelola dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata, sehingga belum optimal.

Kata kunci: program desa wisata, potensi pengembangan perekonomian desa

PENDAHULUAN

Jatinangor merupakan kawasan industri yang banyak terdapat perguruan tinggi. Jatinangor menjadi wilayah yang paling banyak didatangi oleh orang dari luar daerah baik itu untuk melanjutkan pendidikannya maupun untuk usaha. Hal ini karena di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, terdapat perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar. Kehadiran pendatang setiap tahun menjadi sebuah potensi untuk dimanfaatkan dari pengembangan masyarakat Jatinangor itu sendiri.

Salah satu program yang memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Jatinangor adalah wisata edukasi. Program ini berkaitan dengan tingginya masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Jatinangor. Wisata edukasi di Jatinangor tersebut juga diarahkan dengan melibatkan masyarakat sekitar kampus yang ada di Jatinangor. Selain itu, wisata edukasi ini juga sebagai salah satu bentuk pengamalan dari tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat

melalui wisata edukasi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak. Pihak perguruan tinggi yang mempunyai sarana dan informasi yang dapat disebarkan kepada masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga akan terdongkrak ekonominya dengan terlibat dalam wisata edukasi. Sementara wisatawan akan terbantu dengan informasi yang diterimanya

Pengembangan ekonomi lokal melalui Wisata Edukasi keberadaan perguruan tinggi di Desa Cikeruh dan Desa Cibeuhi Kecamatan Jatinangor menjadi aset yang berharga. Hal ini karena perguruan tinggi yang ada di Jatinangor akan menjadi buruan dari siswa SMA untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu banyak juga lembaga pendidikan khususnya SMA yang mengunjungi Jatinangor untuk mengadakan *study tour* di perguruan tinggi yang ada di Jatinangor. Untuk membantu para pendatang yang ingin melanjutkan pendidikan di Jatinangor, maka diperlukan adanya program tertentu. Salah satunya dengan program *education tour*

Secara umum, pariwisata dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pariwisata massal dan pariwisata alternatif atau tematik. Saat ini, trend wisata berubah dari

wisata masal menjadi wisata alternatif. Hal tersebut menyebabkan wisatawan akan lebih memiliki destinasi yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat atau dikenal ekowisata. Salah satu bentuk trend wisata jenis ini adalah *Desa Wisata*, yang telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berbicara soal desa, peran strategis desa saat ini berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Selain menyuplai kebutuhan pangan dan kebutuhan tenaga kerja, desa juga berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata nasional. Trend desa wisata semakin populer pascapandemi COVID-19, dimana trend wisata cenderung menjadi *personalize, customize, localize*, dan *smaller in size*. Kondisi ini membuat jumlah desa wisata terus berkembang setiap tahunnya. Saat ini, sudah terdapat 3.613 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri. Lalu apa sebenarnya desa wisata itu?

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa membangun. Prinsip ini berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.

Dalam membangun desa wisata, di antaranya terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan, sebagai berikut. (1) Kondisi desa, untuk mengetahui potensi wisata, pihak desa perlu memiliki basis data yang jelas mengenai kondisi desa dan bagaimana ekosistem yang dapat

mendukung lokasi wisata nantinya. (2) Keadaan masyarakat dan struktur organisasi, dalam pengembangannya, desa wisata diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat.

Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki, termasuk di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Konsep pengembangan desa wisata mengacu pada keberadaan unsur 3A dalam pariwisata dan *community involvement* atau keterlibatan masyarakat. Adapun 3A yang dimaksud adalah adanya **atraksi** sebagai daya tarik utama desa wisata; **amenitas** sebagai fasilitas pendukung yang dimiliki oleh desa wisata; dan **aksesibilitas** yang dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke desa wisata.

Desa wisata ialah kondisi desa yang menawarkan suasana keaslian kehidupan pedesaan, keaslian kehidupan yang dimaksud seperti sosial budaya, adat istiadat, keseharian, sosial, ekonomi, sejarah,

arsitektur bangunan tata ruang desa yang memiliki ciri khas dan kegiatan ekonomi yang menarik dan unik karena memiliki potensi untuk akomodasi, makanan, minuman, dan lainnya. Umumnya objek wisata yang banyak diminati para wisatawan.

Pengembangan desa wisata merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya untuk menarik minat wisatawan sehingga dapat menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai keindahan objek wisata alam sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan hal tersebut, mengembangkan desa wisata merupakan realisasi dari Undang-undang Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), maka setiap kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah dan menggali potensi desa.

Berdasarkan hal di atas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang - Jawa Barat sebaiknya terus mendorong peningkatan status desa, terutama Desa Jatiroke melalui program desa-desa wisata yang diprioritaskan di Kab. Sumedang.

Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi SPM (standar pelayanan minimal) Desa mencakup beberapa aspek yaitu, kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan (Imron Bulkin, 2015: 3). Pada dasarnya desa mandiri sebagai desa yang mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dalam rangka memperkuat kemandirian desa, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan dalam rangka terwujudnya desa mandiri. Sehingga dalam konsep desa mandiri, diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat melakukan kerja sama yang baik terhadap sistem pemerintahan secara mandiri.

Sebagaimana pendapat dari Sri Edi Swasono (1998: 26) tentang kemandirian, yaitu kemandirian tidak lain adalah kewaspadaan yang dicapai melalui aktivitas, swakarsa, kreativitas dan kesadaran menolong diri sendiri, serta menolak ketergantungan. Dalam pendapat tersebut dapat diartikan bahwa adanya wewenang otonomi desa diharapkan muncul kemandirian desa, serta tidak adanya ketergantungan sebagai sasaran pembangunan desa mandiri. Seperti pada Kabupaten Sumedang, pengembangan destinasi pariwisata akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata. Posisi sektor pariwisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sangat penting sebagai salah satu bisnis inti.

Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis inti, perhatian pemerintah khususnya di Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tujuan pengembangan pariwisata di Desa Jatiroke ini adalah menjadikan pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi serta menjadi sumber pendapatan daerah.

Pariwisata di Kabupaten Sumedang sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi daerah, walaupun sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Program desa wisata ini belum berjalan dengan maksimal dalam hal mewujudkan desa mandiri, hal ini terlihat dari pengelolaan destinasi pariwisata, infrastruktur pariwisata dan komponen pariwisata, yang belum memadai bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan kesadaran masyarakat khususnya pemerintah setempat yang memiliki andil untuk dilakukan sebuah pengoptimalan Desa Wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang akan menjadikan pusat destinasi khususnya di Sumedang, bahkan Jawa Barat. Adapun tujuan PkM ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian mendasari pemberdayaan kepada masyarakat (PkM) IPDN ini untuk fokus pada analisis pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberikan: (1) manfaat ekonomi, seperti pendapatan dan lapangan kerja, (2) manfaat sosial, seperti peningkatan keterampilan masyarakat, (3) manfaat lingkungan, seperti peningkatan infrastruktur, dan manfaat lainnya bagi masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Maksud pemberdayaan kepada masyarakat (PkM) IPDN adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagai potensi untuk meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan dan manfaat PkM ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang diharapkan dapat memberikan (a) manfaat ekonomi, seperti pendapatan dan lapangan kerja; (b) manfaat sosial, seperti peningkatan keterampilan masyarakat; dan (c) manfaat lingkungan, seperti peningkatan infrastruktur, dan manfaat lainnya bagi masyarakat.

Tujuan dan manfaat bagi IPDN, dijadikan sebagai rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di pemerintahan daerah lainnya, sebagai bagian dari kerja sama IPDN dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi IPDN.

Sasaran PkM Desa Binaan

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhuda, 2013).

Adapun dalam pembangunan, ada pengembangan, dan pengembangan wisata. Pengembangan wisata adalah suatu kesatuan rencana yang sifatnya komprehensif dan terpadu dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mengkaji kendala, kondisi lingkungan internal dan eksternal objek wisata sehingga dapat menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.

Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Menurut Kusudianto dalam Pitana & Diarta (2018) bahwa destinasi wisata adalah seperti meliputi: (1) Destinasi sumber daya alam seperti iklim, pantai, hutan; (2) Destinasi sumber daya budaya seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal; (3) Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan. (4) Event seperti pesta kesenian bali, pesta danau toba, pasar malam dan sebagainya. Ditinjau dari aspek fisik, Puspo Ardi menjelaskan bahwa destinasi wisata berwujud sumber daya alam dengan potensi budaya situs damarwulan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata bahwa unsur produk wisata atau destinasi setidaknya ada 3 yaitu: atraksi/ daya tarik wisata, amenities dan aksebilities biasa disingkat 3 A pariwisata. Pengembangan destinasi wisata pada tingkatan tapak lahan setidaknya memperhitungkan 3 poin kunci tersebut (Hermawan, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di jelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Barus Patana, 2013 menjelaskan bahwa Edukasi adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara

Adapun Pembangunan Wisata dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini juga menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. (3) Menghapus pengangguran (4) Melestarikan alam, lingkungan hidup (5) Memajukan kebudayaan (6) Mengangkat citra bangsa (7) Memperbaiki jati diri dan kesatuan bangsa.

Menurut Priasukmana (2001), bahwa pembentukan desa wisata bertujuan untuk: (a) Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan objek wisata yang alternatif. (b) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar. (c) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa. (d) Mendorong masyarakat kota yang alternatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata. (e) Menimbulkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal di desanya serta mengurangi tingkat urbanisasi. (f) Mempercepat pembauran antara orang-orang nonpribumi dengan orang pribumi. Memperkokoh persatuan bangsa sehingga

bisa mengatasi disintegrasi (Edwin & Edwin, 2015).

Pengembangan desa wisata daerah pedesaan merupakan dampak adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya kecenderungan dan motivasi wisata khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari keunikan budaya lokal sehingga mendorong pembangunan wisata daerah pedesaan. Objek wisata yang ada di daerah pedesaan merupakan suatu desa yang mempunyai sarana yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan dikembangkan menjadi objek wisata baru.

Sebelum mengembangkan desa wisata, terlebih dahulu harus memperhatikan aspek 4 A, yaitu *attraction* merupakan produk utama sebuah tujuan wisata. Hal ini berkaitan dengan apa yang dapat dilihat dan dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Hal yang dapat dilihat dan dilakukan di desa wisata di sini dimaksudkan adalah seperti keindahan alam dan keunikan dari alam yang ada di lokasi, kemudian booth photo, area bermain, peninggalan cerita legenda, atraksi khas desa tersebut, seperti seni budaya, upacara adat, budaya lokal, bahasa lokal, makanan khas lokal dan lain-lain (Made Antara dan Sukma Arida, 2015).

Selanjutnya *accessibility* merupakan infrastruktur dan sarana yang akan mengantarkan ke lokasi wisata tersebut, sarana transportasi akses jalan serta petunjuk arah menuju lokasi wisata tersebut. Banyak wisatawan yang kecewa karena hal dalam akses tersebut tidak memenuhinya.

Amenity merupakan sarana pendukung untuk melengkapi fasilitas para wisatawan dalam memenuhi keinginannya selama di lokasi. Desa wisata dapat menyediakan tempat penginapan/*homestay*, warung

makan atau warung perlengkapan, toilet, tempat parkir, klinik, tempat ibadah dan fasilitas lainnya yang akan memberikan kemudahan kepada para wisatawan. Fasilitas ini diharapkan berjauhan dengan destinasi alam yang dituju karena dikhawatirkan mengganggu akan kekhasan dari alam tersebut. Pengelola harus mampu memetakan destinasi dengan fasilitas umum tersebut.

Ancillary merupakan orang-orang yang terjun langsung dalam pengurusan dan pengelolaan lokasi desa wisata, dengan dikelola oleh orang-orang yang berkomitmen terhadap desa tersebut, maka wisatawan atau pengunjung akan berdatangan karena pelayanan dan keunikan dari lokasi.

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata, antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Faris Zakaria, 2014).

Destinasi wisata dalam Permedagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pada pasal 2, menjelaskan jenis ekowisata di daerah bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan dan ekowisata darat.

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA BINAAN IPDN

Pelaksanaan kegiatan PkM dengan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak dapat diperoleh melalui proses statistik atau hitungan lainnya (Strauss dan Corbin 2003:4). Dalam penjelasannya bahwa data yang didapat tidak terdapat hubungan statistik. Sejalan dengan itu, menurut Afrizal (2019:13) memaparkan pendapatnya sebagai berikut: penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mendata

serta menganalisis data dalam bentuk lisan maupun tulisan dan aktivitas manusia serta tidak adanya upaya dari peneliti untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh sehingga tidak ada kegiatan analisis angka. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara, metode ini berhubungan dengan wawancara secara langsung.

Adapun wawancara dalam PkM ini dilakukan kepada 10 orang dari pihak Pemkab. Sumedang melalui Kepala Desa Jatiroke, fasilitator dan masyarakat di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, yang didukung oleh data-data dokumentasi yang didapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, serta data-data lain yang penulis peroleh dari hasil PkM serta sumber-sumber lain yang relevan dari Desa Jatiroke dan Kecamatan Jatinangor.

Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah metode deskriptif analisis dengan penentuan lokasi secara sengaja (*purposive*) yaitu cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan tertentu (Singarimbun, 1995). Lokasi penelitian dipilih di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut merupakan lokasi desa wisata yang potensial untuk dikembangkan. Jumlah responden yang diambil adalah 10 orang dari pihak desa dan pihak pemerintah yang melaksanakan program desa wisata.

Program PkM Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dari adanya aksi pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. PkM ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat Desa Jatiroke.

Desa wisata Jatiroke telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat di Desa Jatiroke dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat dalam kesadaran adanya potensi tempat sebagai tempat wisata. Komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata: (1) Kondisi desa sekarang, untuk mengetahui potensi wisata desa yang ada, maka pihak Desa Jatiroke harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu lokasi wisata nantinya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti pengumpulan data dan kerja sama dengan berbagai pihak ketiga. (2) Keadaan masyarakat dan struktur organisasi, desa wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh Desa Jatiroke sendiri, kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurus desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta ada pihak yang menentukan arah desa wisata.

Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa pengembangan desa wisata oleh Pemerintah Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain

itu pemerintah desa belum melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke belum memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan pembahasan hasil PkM terkait dengan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sebagai berikut: berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum terlaksana dengan baik oleh karena pemerintah desa belum memberikan pengakuan dan dukungan serta mempromosikan pariwisata yang dimiliki. Padahal pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata, agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum ditunjang dengan keterlibatan masyarakat sejak awal pada setiap aspek pengembangan desa wisata. Peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola

dengan baik, maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Oleh karena itu, promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda. Menurut Oka (2007:76) bahwa "Berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi".

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Hal ini disebabkan pemerintah desa belum bekerja sama dalam mengembangkan desa wisata, selain itu pelibatan masyarakat masih kurang dalam merencanakan pengembangan desa wisata dan pemerintah desa belum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan desa wisata sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan.

Kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat (setempat). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anindita (2015:11) bahwa "Prinsip pengembangan pariwisata salah satunya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata".

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum dapat menjamin sustainability lingkungan ada di sekitar objek wisata. Hal ini disebabkan pemerintah desa kurang melakukan perlindungan terhadap wisatawan dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi, dan pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan kepariwisataan secara adil serta kurangnya pemerintah desa membuat kebijakan terkait terhadap perlindungan dan pemeliharaan budaya dan seni tradisional di masyarakat. Selanjutnya agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata.

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum memelihara karakter dan budaya lokal yang unik karena pemerintah desa belum memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis dalam mengembangkan desa wisata, dan pemerintah desa belum melakukan pengembangan desa wisata yang peka terhadap tradisi dan budaya yang ada di masyarakat, serta kurangnya pemerintah desa menjaga sumber daya alam, sosial dan budaya dalam pengembangan desa wisata.

Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan baik sehingga dapat

diterima dan didukung oleh masyarakat lokal, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal khususnya.

Menurut Suwanto (2002:50) bahwa bentuk pariwisata yang dikembangkan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat dan tidak harus menempatkan setiap anggota masyarakat, sebagai tuan rumah dalam posisi inferior.

Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih mengembangkan cross cultural learning dan pemerintah desa dalam tahap membina hubungan yang seimbang antara wisatawan dengan masyarakat setempat, serta pemerintah desa masih dalam tahap menghitung untuk memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat, dan pemerintah desa terus berupaya bersama-sama dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal.

Hadiwijoyo (2012: 71) menyatakan bahwa "Model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal".

Lebih lanjut Suansri (2003:14) menyatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek

keberlanjutan lingkungan dan budaya di dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, melalui hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan faktor budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia. Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang harus lebih menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia karena pemerintah desa kurang bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan desa wisata, dengan menghargai tradisi budaya dan agama setempat, serta pemerintah desa kurang menjaga kelestarian lingkungan objek dan daya tarik wisata. Sehingga pembangunan tersebut selain tidak merusak ekosistem fisik, juga harus dapat diterima atau tidak mengganggu sistem sosial dan budaya masyarakat setempat. Menurut Pitana (2009: 27) bahwa pengembangan pariwisata yang berbaur dengan kegiatan masyarakat sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan-kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai objek dan daya tarik pariwisata yaitu daya tarik wisata tetap terjaga kelestariannya, dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat. Berdasarkan hasil PkM diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten

Sumedang belum menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat karena pemerintah desa belum merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata, dan pemerintah desa belum melaksanakan pengembangan desa wisata secara efektif dan efisien, serta pemerintah desa belum melaksanakan pengembangan desa wisata secara akuntabel sehingga memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Anindita (2015:13) bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

Hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yaitu adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan desa wisata oleh pemerintah desa, yang antara lain sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah belum memberikan dukungan dalam membantu mempromosikan desa wisata, selain itu masih kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengembangkan keberadaan desa wisata. (b) Masyarakat perlu memberikan dukungan lebih kepada pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata sehingga menyebabkan keberadaan desa wisata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat . sehingga terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun belum dimanfaatkan oleh masyarakat. (c) Kurangnya anggaran yang disediakan untuk melakukan promosi kepada masyarakat, serta kurangnya dukungan dari dinas pariwisata dalam membantu mempromosikan keberadaan desa wisata secara nasional. (d) Kreativitas dari masyarakat setempat perlu dikembangkan

untuk mengembangkan desa wisata sehingga keberadaannya dapat memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian masyarakat.

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut dan menangani berbagai kendala dalam pengembangan desa wisata, pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang melakukan upaya-upaya yang antara lain sebagai berikut.

- (a) Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat membantu pengembangan desa wisata melalui peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
- (b) Melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di desa sehingga masyarakat dapat mengambil peran dalam membuat keputusan pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.
- (c) Memberikan dukungan anggaran yang memadai serta meningkatkan swadaya masyarakat guna menambah anggaran yang terbatas dari pemerintah desa, sehingga keberadaan desa wisata dapat dikembangkan, yaitu merupakan program kerja kampung wisata.
- (d) Mengadakan pelatihan bagi pelaku atau pengelola objek desa wisata sehingga mampu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan desa wisata, seperti meningkatkan kemampuan pengrajin yang ada di desa wisata sehingga dapat memanfaatkan keberadaan desa wisata dalam rangka meningkatkan pendapatannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil PkM tentang program desa wisata dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, bahwa program desa wisata oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain itu pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program desa wisata di Desa Jatiroke sebagai potensi meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa mengalami beberapa hambatan, yaitu pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang antara lain karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium pemerintahan dan website desa untuk menunjang keberadaannya, sehingga kurang menarik minat wisatawan untuk datang. Kemudian dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan PAD Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih belum terarah, dan belum melibatkan pengelola dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata, sehingga belum optimal.

Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, antara lain dengan

meningkatkan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan keberadaan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang dapat membantu pengelola dalam melakukan pengembangan desa wisata, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil PkM, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemerintah Desa Jatiroke dalam mengembangkan desa wisata melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang dan Pemkab. Sumedang melalui Kecamatan, untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti mengadakan kegiatan pentas seni maupun kegiatan sosialisasi program-program desa wisata, sehingga melalui kegiatan tersebut dapat mempromosikan desa wisata kepada pihak lain.
2. Sebaiknya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan- hambatan pengembangan desa wisata dengan melakukan kerja sama dengan biro-biro perjalanan wisata seperti *travel agent* sehingga dapat membantu memperkenalkan daya tarik desa wisata kepada pihak lain dan dapat membawa wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata.
3. Selain itu meningkatkan dana swadaya dari masyarakat dalam membantu pengembangan desa wisata, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa saja karena nantinya bermanfaat untuk masyarakat setempat.
4. Sebaiknya pemerintah desa dapat mengatasi hambatan- hambatan pengembangan desa wisata dengan berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam

mengembangkan desa wisata dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan serta pelatihan kepada pengelola desa wisata, sehingga kegiatan tersebut dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola desa wisat

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely & Bradshaw. 2002. *Planning Local Econo-mic Development, Theory and Practice*. California
- Dendi, A. H. R. & Mahman, R. 2007. *Forum Pengembangan Ekonomi Lokalkonsep, Strategi dan Metode; Perspektif dan Pengalaman Nusa Tenggara*. GTZ-GLG dan Departemen Dalam Negeri Indonesia.
- Indratno, I. & Agustina. I. H. 2005. *Studi Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Eko-nomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21(3): 416-429.
- Martati, Indah. Suminto dan Syarifuddin, Andi. 2013. *Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir. Samarinda: Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Samarinda*. JMK, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 123-130 ISSN 1411- 1438
- Neni. 2013. <http://mahaneni.blogspot.co.id/2013/09/peran-pekerja-sosial-dalampengembangan.html> dikutip pada 21 November 2016 pukul 23.48 wib.
- Raharjo, ST. 2015. *“Pekerjaan Sosial Generalis, Suatu Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas”*, Edisi Revisi Buku, Unpad Press, Raharjo, ST. 2015. *“Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial”*, Buku, Unpad Press
- Raharjo, ST., Taftazani, BM., Apsari, NC., Santoso, MB. 2016. *“PANDUAN PRAKTIKUM MIKRO (Konseling dan Pengembangan Diri)”*. Buku. Unpad Press.

Raharjo, ST. 2015. *“Assessment dan Wawancara dalam Prakti Pekerjaan*

Sosial dan Kesejahteraan Sosial”, Edisi Revisi Buku, Unpad Press.

Suharto, Edi. 2010. www.policy.hu/suharto/modula/makindo_34.htm dikutip pada Selasa, 22 November 2016 pukul 00.33 wib.

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/12/16/pengembang-kian-getol-bikinapartemen-mahasiswa> <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2093/informasi-publik-dinas-koperasi,-ukm,->

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor Nomor 3, Bulan September Tahun 2019